

BAB II

KONFLIK ETNIS ROHINGYA DAN DAMPAK KONFLIK ETNIS ROHINGYA

Asia Tenggara merupakan kawasan yang dihuni oleh masyarakat heterogen, ada 10 negara yang terdapat dalam kawasan ini salah satunya ialah Myanmar. Myanmar merupakan negara di Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Bangladesh dan India di sebelah barat, Bhutan dan China di sebelah utara, Laos dan Thailand di sebelah timur. Sedangkan untuk sebelah selatan Myanmar berbatasan langsung dengan Laut Andaman. Seperti negara-negara Asia Tenggara yang lain, demografis Myanmar juga beragam dan cukup padat. Myanmar mempunyai tujuh negara bagian, dari negara bagian itu dihuni oleh beberapa etnis

Republik Persatuan Myanmar atau dikenal juga dengan Birma atau Burma oleh negara-negara barat, merupakan negara yang merdeka dari kolonialisme Inggris pada 4 Januari 1948. Pergantian nama dari Burma menjadi Myanmar ini merupakan hasil dari Junta Militer Myanmar yang pada tahun 1989, bermaksud agar etnis non Burma merasa menjadi bagian dari negara Myanmar. Namun perubahan nama ini tidak diadopsi oleh semua negara di dunia terutama negara persemakmuran Inggris, hal ini disebabkan oleh negara-negara persemakmuran Inggris tidak mengakui kekuasaan junta militer di Myanmar.

Penduduk Myanmar merupakan keturunan dari ras Mongol, selebihnya adalah keturunan dari India dan Pakistan. Sebagian besar dari penduduk Myanmar berprofesi petani menyesuaikan kondisi geografis negaranya dan juga tinggal di daerah pedesaan, hanya sebagian saja yang menduduki perkotaan. Kependudukan Myanmar dihuni oleh etnis mayoritas Burma (Bamar) yang jumlahnya diperkirakan mencapai 70 persen dari seluruh jumlah penduduk. Terdapat 8 etnis besar yang diakui keberadaannya dan diberi wilayah geografis dan peraturan otonom khusus. Delapan etnis besar Myanmar itu ialah:

1. Etnis Bamar, merupakan etnis mayoritas di Myanmar terdiri dari dua pertiga dari total warga Myanmar, beragama Buddha dan menghuni sebagian wilayah negara kecuali pedesaan.
2. Etnis Karen, merupakan etnis beragama Buddha dan Kristen atau perpaduan antara dua agama, yang memperjuangkan otonom selama 60 tahun, menghuni pegunungan yang berbatasan dengan Thailand.
3. Etnis Khayah, merupakan etnis beragama Buddha yang berkerabat dengan etnis Thai.
4. Etnis Arakan/ Rakhine, merupakan etnis yang disebut juga sebagai etnis Rakhine beragama Buddha, menduduki wilayah Arakan atau Myanmar barat.
5. Etnis Mon, merupakan etnis Buddha yang menduduki kawasan selatan Myanmar.

6. Etnis Kachin, merupakan etnis agama Kristen, yang terpecah dari etnis mereka yang juga menduduki Tiongkok dan India.
7. Etnis Chin, merupakan etnis beragama Kristen yang menghuni negara bagian Myanmar yang berbatasan dengan India.
8. Etnis Shan, merupakan etnis beragama Islam yang tinggal di utara Myanmar, bersebelahan dengan Thailand dan Tiongkok, beragama Buddha dan agama tradisional.

Mayoritas etnis yang ada di Myanmar adalah etnis yang beragama Buddha, Islam menjadi etnis minoritas yang diperkirakan sekitar 5 persen dari populasi total dan minoritas lainnya ialah Kristen. Selain 8 etnis besar yang diakui di Myanmar, ada sekitar 130 ragam etnis yang menduduki Myanmar yang keberadaannya sebagian diabaikan dan didiskriminasi termasuk etnis Islam Rohingya.(Singh 2014) Islam di Myanmar bukanlah Islam yang homogen, muslim Panthay dan Kaman sebagian besar berasimilasi kepada mayoritas Buddhis Myanmar namun muslim Rohingya tidak. Muslim Rohingya tidak melakukan asimilasi¹ dengan mayoritas Buddhis Myanmar, dan memilih tetap menggunakan identitas mereka sendiri dengan menjadi satu suku yang berbeda, sehingga pada kemerdekaan Burma tahun 1948, etnis Rohingya tidak diakui keberadaannya oleh negara.

¹Asimilasi adalah peleburan sifat yang dimiliki orang Rohingya dengan sifat lingkungan sekitar yakni Buddhis, pembauran nilai-nilai kehidupan terhadap Buddhis Myanmar, sikap warga masyarakat yang kemudian menjadi satu bangsa, yakni Myanmar.

Keberadaan orang Rohingya di Myanmar yang tidak diakui, sudah menggambarkan Rohingya sebagai salah satu etnis yang paling teraniaya, bukan hanya di negaranya namun juga di Asia Tenggara bahkan dunia. Mereka bukan hanya tidak diakui kewarganegaraannya pada situasi 1948 namun hal itu berlanjut sampai sekarang, bahkan orang Rohingya juga secara brutal ditindas oleh Myanmar. Konflik horizontal antara etnis minoritas muslim Myanmar dengan mayoritas Buddha Myanmar semakin memanas atas kasus Mei 2012 yang melibatkan kedua belah pihak. Dan hasil dari pecahnya konflik itu ialah banyak terjadi pelanggaran HAM, yang berbentuk kekerasan, penyiksaan, pembantaian etnis dan pemerkosaan serta penelantaran etnis dengan pencabutan kewarganegaraan etnis Rohingya di Myanmar.

Karena takut akan tindakan kekerasan dan pendiskriminasian yang berlanjut, etnis Rohingya memutuskan untuk melakukan eksodus besar dari negara Myanmar, perpindahan masal ini mereka lakukan dengan berbagai cara, negara tujuan dari pelarian etnis Rohingya pun beragam seperti Bangladesh, Turkey, Thailand, Malaysia dan Indonesia. Salah satu cara etnis Rohingya melakukan perpindahan masal dengan menumpang kapal ilegal yang membawa perdagangan manusia ke Malaysia. Namun dalam perjalanan perpindahan etnis Rohingya terdapat beberapa halangan dan penolakan oleh negara-negara yang dituju. Penolakan itu juga sempat terjadi di negara-negara Asia Tenggara yang memiliki penduduk mayoritas Islam yakni Malaysia dan Indonesia.

A. Awal mula konflik Rohingya di Myanmar

Sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk mayoritas Buddhis dan wilayahnya diduduki oleh berbagai etnis, konflik horizontal sangat mudah untuk pecah di Myanmar. Nasionalisme yang salah dan telah mengakar menjadi salah satu pemicunya, Burma atau Bamar mendominasi seluruh aspek kehidupan seperti kehidupan militer, ekonomi, pemerintahan dan bahasa, mencoba mengarahkan Myanmar ke Burmaisme. Secara historis, kolonial Inggris berperan atas konflik horizontal yang dewasa ini terjadi di Myanmar. Kolonial Inggris hanya menguasai mayoritas Buddha di Myanmar dan mengabaikan berbagai etnis minoritas di Myanmar termasuk juga etnis Rohingya. Kolonial Inggris memberikan otoritas kepada pemimpin tradisional etnis minoritas Myanmar untuk mengelola etnis mereka sendiri. Dampak dari hal ini dirasakan ketika Myanmar merdeka pada tahun 1948, dimana bom waktu yang ditinggalkan oleh kolonialisme meledak dan konflik etnis terus terjadi hingga sekarang. Akibat hal itu, segala aspek yang ada di Myanmar dikuasai oleh Buddhis.

Nasionalisme yang terbentuk berdasarkan Buddhis pada 1920-an dan 1930-an yakni “menjadi orang Burma (Myanmar) adalah menjadi orang Buddhis”, nasionalisme ini sering dinilai orang non Buddhis sebagai intoleransi yang melekat pada orang Burma kala itu. Dalam konteks ini, pemimpin nasionalis Myanmar sering memobilisasi Buddhisme untuk membangun ideologi nasional dan identitas guna melawan kolonialisme Inggris, namun nasionalisme ini menimbulkan dampak negatif bagi etnis-etnis minoritas di Myanmar bahkan berlanjut hingga sekarang. Etnis-etnis minoritas Myanmar harus melakukan

asimilasi terhadap mayoritas Buddha Myanmar. Etnis Rohingya adalah etnis minoritas muslim di utara Myanmar yang menentang melakukan asimilasi terhadap mayoritas Myanmar seperti etnis-etnis minoritas Myanmar lainnya, dan tetap menjadikan etnis Rohingya sebagai suatu suku muslim yang berbeda.

Etnis Rohingya merupakan suatu etnis minoritas muslim yang tinggal di Negara Bagian Rakhine, utara Myanmar. Keberadaan etnis Rohingya di Myanmar sudah sejak berabad-abad lalu, namun keberadaannya tidak diakui bahkan diabaikan seperti etnis-etnis minoritas yang lain di Myanmar. Dijelaskan diatas, bahwa mayoritas penduduk Myanmar adalah Buddha, yang menurut *World Factbook* pada Juli 2012 etnis Burma mencapai 68 %, dan 27 % di tempati oleh etnis mayoritas Myanmar yang diakui seperti Shan, Karen, Rakhine, China, India dan Mon, sedangkan 5 % adalah etnis-etnis minoritas. Jika dilihat berdasarkan agama, maka Buddha berada di angka 89 %, Kristen 4 %, Baptis 3 %, Katolik Roma 1 %, Islam 4 %, animisme 1% dan lainnya 2%. Dari keberadaan orang Islam sebesar 4 %, etnis Rohingya pada pertengahan 2012 menempati angka 1,4 % dari populasi total Islam di Myanmar, yang artinya mempunyai proporsi yang relatif kecil dan tidak terlalu dipentingkan oleh negara. Rohingya menganut Islam sunni dan berbahasa Rohingya, ciri-ciri jasmaniah mereka lebih menunjuk kepada keturunan non Tibet Bengali daripada keturunan Myanmar.

Ketidakcocokan antara mayoritas Buddhis dan muslim Rohingya di Myanmar bukan berasal dari penampilan fisik namun lebih lagi yaitu ketidakcocokan peradaban antara keduanya. Ketidakcocokan antara mayoritas Buddha dan minoritas Islam Rohingya ini lebih kepada kekhawatiran tentang

perbedaan keamanan, ideologis, bahasa, politik yang berkaitan dengan ekstrimisme Islam dan terorisme. Ini telah membangkitkan kekhawatiran yang besar sehingga kekerasan dan penganiayaan terus dilakukan mayoritas Buddha sehingga memperburuk keadaan keduanya. Secara etnis pun, Rohingya berbeda dengan etnis minoritas lainnya di Myanmar, terutama jika dilihat dari warna kulitnya, bahasa yang digunakan, kepercayaan agama, budaya dan adatnya, bahkan mereka yang tinggal memusat di utara dekat dengan Bangladesh sehingga mempunyai kedekatan lebih terhadap etnis Bengalis di Bangladesh. Hal ini juga menjadi salah satu alasan yang digunakan Myanmar untuk menuduh etnis Rohingya sebagai etnis pengungsi dari Bengali. Namun para pemimpin Rohingya bersikeras bahwa Rohingya merupakan warga asli Arakan dan mereka sedang dilanggar hak asasinya untuk menentukan nasib sendiri dan diusir dari tanah kelahiran mereka. Menurut U Kyaw Min, seorang Rohingya Buthidaung Utara mengutarakan bahwa Islam sudah masuk ke Arakan pada abad ke 8 dan dari sanalah Islam menyebar di Myanmar. Namun mayoritas Buddhis yang mempunyai kekuasaan menganggap orang Rohingya adalah warga Bengalis dari Chitagong, merupakan warga asing dan hanya layak mendapat status migran biasa bukan menjadi warga negara.

Muslim Rohingya bukanlah satu-satunya etnis muslim di Myanmar, namun muslim selain Rohingya mengidentifikasi diri sebagai muslim Myanmar dan muslim pribumi. Kebanyakan muslim Myanmar merupakan keturunan India dan orang Burma melalui antarperkawinan berabad-abad lalu. Orang muslim Myanmar (selain Rohingya yang berasimilasi dengan Myanmar) ditarik dari

orang-orang Rohingya, muslim Myanmar yang nenek moyangnya India dan orang-orang Bamar yang menganut Islam tergantung pada posisi politik dan akademiknya. Di Negara Bagian Rakhine, Arakan yang ditempati oleh etnis Rohingya, juga ditempati oleh mayoritas etnis Rakhine(Buddhis taat, bahasa Burma Kuno)(Sail 2011). Etnis Rakhine terkadang merasa terganggu oleh perlakuan dan kebijakan junta militer Myanmar terhadap orang Rohingya, karena secara demografis orang Rohingya berada di Arakan. Orang Rakhine menganggap mayoritas Bamar ingin menguasai Arakan dengan cara membaurkan orang Rakhine dengan Bamar. Namun orang Rakhine juga menganggap keberadaan etnis Rohingya sebagai bentuk dari islamisasi Bangladesh dan tidak mau menerima mereka sebagai penduduk pribumi Negara Bagian Rakhine.(Saw 2012) Meskipun orang Rakhine tidak tercatat melakukan kekerasan terhadap etnis Rohingya, diam-diam mereka telah mendukung Bamar dalam pembersihan etnis demi menjaga tanah air mereka dari islamisasi dan imigrasi ilegal.

Etnis Rohingya berulang kali menuntut untuk diakui sebagai satu minoritas pribumi. Dalam tuntutan ini etnis Rohingya menyatakan hasrat untuk dianggap sebagai kelompok etnis mayor lainnya dengan tujuan menikmati satu negara bagian etnis dan Perjanjian Panglong 1947 yang isinya berhak untuk memisahkan diri. Tuntutan ini dianggap sebagai usaha politik untuk memisahkan diri dari Myanmar oleh pemerintah militer dan orang Rakhine, Arakan. Oleh karenanya, orang Rakhine menolak dengan keras tuntutan tersebut. Penganiayaan dan diskriminasi tidak lagi didasarkan pada perbedaan sejarah dan identitas, namun lebih kepada pemberontakan Rohingya di masa lalu yang membawa

bendera Mujahidin dijadikan isu utama yang dipadukan dengan masalah ras dan agama. Perselisihan semakin meruncing ketika keduanya memiliki pemikiran masing-masing tentang sejarah etnis mereka di Arakan. Dalam kasus ini pemerintah militer Myanmar lebih memberi dukungan terhadap etnis Rakhine, bukan hanya karena etnis Rakhine merupakan salah satu etnis mayoritas Myanmar yang taat terhadap Buddha, namun etnis Rakhine dianggap sebagai “Gerbang atau Dinding Barat” dari Myanmar untuk menahan ekspansi Islam di Myanmar.

Konflik antara etnis Rakhine dan etnis Rohingya diawali dengan saling menuduh satu sama lain untuk siapa yang melemparkan batu pertama kali dan kemudian melakukan pembantaian berikutnya, klaim orang etnis Rakhine mengatakan bahwa etnis Rohingya membantai orang Arakan, namun klaim ini dibalas oleh etnis Rohingya yang menyatakan bahwa lebih dari 100.000 muslim dibunuh oleh orang Buddhis pada masa Perang Dunia Ke II dan muncul ke media(Jilani 2006). Konflik antara etnis ini terus berlanjut hingga sekarang, namun yang paling menderita dan mengalami penindasan dalam konflik ini ialah etnis Rohingya, dimana mereka merupakan etnis minoritas di Myanmar dan etnis Rakhine didukung oleh pemerintah militer di Myanmar.

Konflik etnis di Myanmar terkhusus Rohingya sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu, bahkan *Human Right Wacth* menyatakan bahwa etnis Rohingya adalah etnis yang paling tertindas di Asia Tenggara bahkan di dunia.(H. R. Watch 2009) Isu ini kembali hangat pada tahun 2012, konflik ini mewarnai media internasional dengan cerita yang lebih dramatis. Pada Mei- Juni dan Oktober 2012, sebuah kerusuhan komunal pecah di Negara Bagian Rakhine dan menuju Myanmar

Tengah. Kerusuhan yang disinyalir berasal dari kasus pemerkosaan, perampokan dan pembunuhan seorang perempuan Rakhine bernama Thida Hwte di Desa Thabyechaung, Kota Yanbye pada 28 Mei 2012. (Brussels 2012) Dan pada 5 Juni media merilis pelaku adalah 3 pemuda dari Bengali, yang ditangkap keesokan harinya. Kemudian pada sore hari tanggal 3 Juni tersebar berita bahwa ada sebuah bus yang melewati Taungup berisikan orang muslim dan berisikan pelaku kejahatan tersebut, diberhentikan oleh 300 orang Buddhis Myanmar dan terjadilah pembakaran dan pembunuhan terhadap penumpang bus itu, sekitar 10 orang non Rohingya muslim juga dibunuh semena-mena dan bahkan *International Crisis Group* menyatakan ada seorang Buddhis yang dianggap muslim juga ikut terbunuh.(Brussels 2012)

Berawal dari kejadian ini, cerita dari kejadian-kejadian yang diberikan oleh orang Rakhine dan orang Rohingya berbeda. Cerita orang Rakhine menyatakan bahwa orang Rohingya menembaki keamanan Rakhine, sedangkan versi orang Rohingya menggambarkan orang Rakhine adalah kelompok yang suka main hakim sendiri yang berkolaborasi dengan aparat keamanan negara. Media resmi dan Kantor Presiden Thein Sein melaporkan pada 8 Juni terdapat lebih dari 1.000 perusuh di Maungtaw, satu kota berbatasan langsung dengan Bangladesh menyerbu dan menghancurkan sejumlah kantor pemerintah dan properti milik orang Rakhine. Media resmi tersebut tidak menyebutkan siapa perusuh itu, namun media swasta di Burma menyatakan bahwa perusuh itu berasal dari orang Rohingya. Bermula dari peristiwa ini dari kedua belah pihak aktif menerbitkan artikel yang mempunyai gambaran bias, tidak dapat dipertanggungjawabkan

keabsahan beritanya, dan tanpa verifikasi fakta. Situs *website* Rakhine umumnya memuat artikel yang menyoroti kekerasan orang Rohingya, keterkaitan dengan organisasi terorisme dan penolakan klaim etnisitas orang Rohingya. Sedangkan *website* Rohingya menyoroti tuduhan terperinci tentang kekerasan orang Rakhine terhadap Rohingya yang di sponsori negara, *update* mendetail dari kekerasan yang dilakukan orang Rakhine dan keluhan kepada dunia Muslim disertai foto dan video.(Singh 2014). Media dan komunitas internasional tampaknya lebih pro terhadap Rohingya, sehingga banyak yang memuat berita dari peristiwa kekerasan di Myanmar ini. Meskipun bukti tentang kekerasan sulit untuk diverifikasi namun korban yang berjatuhan akibat konflik tidak dapat dipungkiri lagi, disimpulkan bahwa ribuan orang Rohingya tewas dalam konflik itu dan bukti tidak dapat didapatkan karena disembunyikan oleh militer Burma, namun pemimpin Rohingya menyatakan bahwa banyak sekali kuburan massal orang Rohingya akibat konflik tersebut.(Erdogdu 2012)

B. Dampak Dari Konflik Rohingya

Konflik horizontal antara mayoritas Buddha Rakhine dan minoritas Islam Rohingya yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini, menyebabkan beberapa pelanggaran HAM, pembantaian, dan peristiwa eksodus oleh etnis Rohingya. Keterlibatan pemerintah junta militer yang mendukung tindakan etnis Rakhine membuat etnis Rohingya lebih terpojokkan. Penolakan Myanmar untuk pemberian kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya, serta kekerasan, penindasan

dan pelanggaran HAM yang dialami Rohingya menyebabkan etnis Rohingya memilih untuk melakukan eksodus ke negara-negara tetangga Myanmar. Namun penderitaan Rohingya tidak berhenti pada kekerasan yang terjadi akibat konflik horizontal itu, melainkan lebih lanjut ketika etnis Rohingya ditolak oleh negara-negara yang menjadi harapan bagi etnis Rohingya termasuk Bangladesh, Thailand, Malaysia dan Indonesia.

a) Penolakan pemberian kewarganegaraan etnis Rohingya

Sejarah mempunyai peran penting dalam konflik horizontal di Myanmar, khususnya Negara Bagian Rakhine. Kekuasaan Inggris terhadap mayoritas Buddha Myanmar dan memberi kebebasan terhadap etnis minoritas di Myanmar menjadi salah satu pemicu pecahnya konflik etnis setelah Myanmar merdeka pada tahun 1948. Dari kondisi ini Buddha Myanmar menguasai seluruh negara bagian di Myanmar tanpa terkecuali. Prinsip nasionalisme yang mereka tawarkan untuk Myanmar adalah “Menjadi Burma(sekarang Myanmar) adalah dengan menjadi Buddhis”, nasionalisme ini menyebabkan beberapa dampak negatif terhadap etnis minoritas yang ada di Myanmar kala itu. Hingga pada tahun 1982 pemerintah Junta Militer Myanmar mengajukan pergantian nama dari Burma menjadi Myanmar dengan tujuan semua etnis yang ada di Myanmar merasa memiliki bangsanya tanpa terkecuali. Namun tindakan itu dilakukan dengan cara-cara Buddhiisme, dimana etnis-etnis minoritas Myanmar diminta untuk berasimilasi dengan mayoritas Buddha di Myanmar. Etnis Rohingya merupakan etnis yang berbeda dengan etnis minoritas lainnya, dalam konteks nasionalisme etnis-etnis minoritas Myanmar melakukan asimilasi terhadap mayoritas Buddha Myanmar

termasuk juga muslim Myanmar non- Rohingya atau yang sering disebut sebagai Muslim Myanmar atau muslim pribumi. Etnis Rohingya tidak melakukan asimilasi dan tetap pada identitas mereka, muslim Rohingya. Dari peristiwa ini, mengundang kekhawatiran mayoritas Buddha di Myanmar tentang keamanan wilayah, politik dan ideologis terutama bagi etnis mayoritas Buddha Rakhine.

Keengganan menganggap etnis Rohingya menjadi etnis pribumi juga berlandaskan fisik, mereka lebih mirip dengan orang Bengali dibandingkan dengan Myanmar keturunan. Etnis mayoritas Buddha Rakhine menuduh Bangladesh memanfaatkan etnis Rohingya untuk menjadi alasan penguasaan Negara Bagian Rakhine. Ketakutan itu bertambah ketika Bangladesh bertikai tentang kedaulatan maritim dengan India dan Myanmar yang kemudian mengklaim 450 mil laut dari pantai menjadi kedaulatannya. (hal 35) Mayoritas Buddha Rakhine selalu menolak dengan keras ketika etnis Rohingya menuntut untuk pengakuan etnis dan menjadi pribumi, sebab ketika etnis Rohingya diakui sebagai etnis di Myanmar maka dapat menjalankan Perjanjian Panglong 1947 yang isinya berhak mendirikan negara bagian sendiri.

Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mengusir etnis Rohingya dari Myanmar, salah satu caranya ialah dengan “Operasi Raja Naga” pada tahun 1978 untuk mendokumentasikan penduduk Negara Bagian Rakhine maupun menekan pemberontakan muslim(Singh 2014) . Dari operasi itu banyak warga Rohingya ditangkap karena pengawasan dari pihak militer sangat ketat. Sebagian besar etnis Rohingya dipaksa pindah karena alasan keamanan. Dampak dari operasi itu ialah lebih dari 200.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh karena tidak

tahan dengan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Junta Militer Myanmar. Berawal dari “Operasai Raja Naga” gerakan dan aktifitas orang Rohingya di Myanmar mendapat pengawasan ketat oleh pasukan perbatasan NaSaKa (*Nei-Sat Kark –we-yae*) yang terdiri dari angkatan darat, kementerian dalam negeri dan personalia imigran. Pasukan ini mengatur wilayah-wilayah tempat orang Rohingya, orang Rohingya menuduh pasukan NaSaKa ini sebagai alat dari negara untuk menindas orang Rohingya. Kehadiran NaSaKa ini meminimalisir tindakan radikal dari etnis Rohingya di Myanmar. Sebagian besar etnis Rohingya tidak mendapat kewarganegaraan dalam pendokumentasian itu, yang artinya terdapat banyak pembatasan dari pergerakan etnis Rohingya itu sendiri. Dimana mereka dilarang untuk melakukan perjalanan, menikah, undang-undang pembatasan kepemilikan anak, dsb. Dasar yang digunakan pemerintahan Myanmar adalah pemerintah sudah berulang kali menyatakan sejak tahun 1947, bahwa syarat menjadi warga Myanmar adalah suatu ras harus ada dalam wilayah yang sekarang membentuk sebagai Myanmar sebelum 1826, tahun ketika Inggris menguasai bagian-bagian yang waktu itu Burma. Sedangkan dokumen Burma maupun Inggris pada era itu tidak menyebut Rohingya, yang secara langsung “mendiskualifikasi” Rohingya dari kewarganegaraan.

Burma Citizenship Law 1982 yang merupakan undang-undang kewarganegaraan Myanmar juga menjadi salah satu alasan tidak diakuinya etnis Rohingya menjadi pribumi Myanmar. Dalam pasal 3 *Burma Citizenship Law* 1982 dinyatakan :

“National such as the Kachin, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakihne or Shan and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the State as their permanent home from period anterior to 1185 B.C., 1823 A.D. are Burma citizens.”

Berdasarkan pasal ini seharusnya etnis Rohingya diakui kewarganegaraanya di Myanmar, tetapi dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa :

“the Council of State may decide whether any ethnic group is national or not”

Sehingga etnis Rohingya berdasarkan ketentuan tersebut kehilangan kewarganegaraan. *Burma Citizenship Law* 1982 juga tidak memberikan batasan atau kriteria suau etnis yang tidak mendapatkan pengakuan oleh dewan. Begitupula kehilangan kewarganegaraan yang diatur oleh *Convention on the Reduction of Statelessness 1961*, etnis Rohingya seharusnya bisa diakui kewarganegaraannya oleh Myanmar. Maka alasan Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya karena menganggap etnis Rohingya berkebangsaan Bangladesh adalah sebuah diskriminatif etnis dan bertentangan dengan hukum internasional. (Tindaon 2012)

b) Diskriminasi dan kekerasan terhadap etnis Rohingya

Dengan status tidak mempunyai kewarganegaraan dan tidak adanya perlindungan dari negara manpun maka etnis Rohingya sangat rentan dijadikan sasaran pelanggaran HAM. Pengawasan ketat dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya melalui unit militer dan penjaga perbatasan Burma. Bahkan penjaga sering dilaporkan mengambil uang, sapi, beras dari rumah orang Rohingya tanpa diperintah oleh atasan mereka. Apabila tidak ada yang dapat

diberikan atau dirampas, maka para penjaga itu akan memukuli dan perempuannya diperkosa. (Rabb 1992)

Etnis Rohingya juga dibatasi bermobilisasi, ini adalah tindakan standar militer Myanmar atas pemberontakan yang dilakukan oleh etnis Rohingya. Dan akibat struktur masalah, para tentara yang bertugas tidak mendapat cukup dana untuk beroperasi sehingga mereka mengandalkan hubungan tidak baiknya terhadap orang Rohingya untuk kerja paksa. Menurut *Arakan Rohingya National Organization* (ARNO), kerja paksa adalah bagian umum dari kehidupan sehari-hari bagi orang Rohingya. Para lelaki yang masih sehat dipaksa untuk melakukan kerja paksa secara berulang-ulang tanpa dibayar dan diberi makanan sedikit selama beberapa hari. Bagi perempuan Rohingya, dipaksa melakukan pekerjaan padat karya yang tidak ada tujuan khususnya sehingga mereka dapat diperkosa oleh militer Myanmar.

Selain penganiayaan secara fisik, mereka juga dianiaya secara agama. Orang Rohingya dilarang melaksanakan ibadah dalam publik Myanmar. Orang Rohingya juga tidak bisa melaksanakan ibadah haji, karena mereka tidak memiliki kewarganegaraan sebagai salah satu syarat pembuatan paspor. Fasilitas ibadah seperti madrasah, masjid, dan bangunan peninggalan Islam ditutup bahkan beberapa dihancurkan sehingga mereka tidak dapat menggunakannya. Kamp militer juga sengaja didirikan di atas tanah yang dianggap suci oleh muslim Rohingya dan mereka yang tinggal di sekitar kamp dipaksa untuk pindah. Masjid dan bangunan religius Islam dihancurkan dan sebagai gantinya didirikan kuil

diatasnya. Selain itu tentara Burma dan pasukan perbatasan memaksa etnis Rohingya untuk berpindah agama menjadi Buddha.

Etnis Rohingya juga melaporkan bahwa pasukan NaSaKa menahan para pemuda dan orang tua Rohingya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Beberapa unit tentara dilaporkan terlibat dalam kasus penculikan dan pemerkosaan perempuan Rohingya yang suami atau ayah mereka pergi untuk kerja paksa. Selain itu, orang Rohingya yang melakukan kerja paksa menghadapi ancaman terbesar pembunuhan ekstra yudisial dan tubuh mereka dimutilasi.

Dengan berbagai macam diskriminasi dan kekerasan yang terjadi pada etnis Rohingya, sebagian besar dari etnis Rohingya merencanakan eksodus ke negara-negara tetangga Myanmar, dengan harapan baru bahwa mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak dibandingkan bertahan di tanah kelahiran mereka.

c) Eksodus Myanmar ke Negara-negara Asia Tenggara

Akibat kekerasan dan diskriminasi yang dihadapi oleh etnis Rohingya, mereka memutuskan untuk melarikan diri dari tanah kelahirannya itu. Pada “Operasi Raja Naga” tercatat sebanyak 200.000 lebih orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. (Imtiaz Ahmed,2001) Namun di Bangladesh mereka tidak diberikan status pengungsi dan dipaksa kembali ke Myanmar setelah Operasi Raja Naga selesai pada 1978 dibawah supervisi UN. Kemudian peristiwa eksodus kedua ialah pada tahun 1991-1992 ke Bangladesh kali ini lebih dari 250.000 orang Rohingya yang memadati Bangladesh, menyebabkan krisis kemanusiaan paling

buruk dalam sejarah Asia Tenggara. (H. R. Watch 2009) Namun negara-negara Asia Tenggara tidak melakukan banyak hal mengenai isu ini. Letusan kekerasan dilaporkan terjadi di dalam Myanmar telah menghidupkan siklus pelarian dan orang-orang Rohingya tidak mempunyai tujuan.

Pelarian melalui perahu terkuak setelah perahu-perahu yang membawa mereka terapung-apung sepanjang 2009 di berbagai teritorial yang berbatasan dengan Lautan Hindia yang menuju ke Thailand, Malaysia dan Indonesia. Menurut Chris Lewa dari Proyek Arakan, yang mendokumentasikan pelanggaran HAM orang Rohingya, mencatat bahwa perpindahan tujuan itu bukanlah merupakan suatu kemajuan baru, karena mereka sudah puluhan tahun bergantung pada penyelundupan dan dokumen. Dia mencatat ada etnis Rohingya yang menuju Malaysia lewat Thailand jumlahnya meningkat pada tahun 2006. Dalam catatannya Lewa memperkirakan sekitar 8000 Rohingya berangkat dari Pantai Bangladeshi menuju Malaysia dan Thailand antara Oktober 2006 dan Maret 2008. (Lewa 2008).

Dalam satu insiden pada awal 2009, sebuah perahu yang membawa orang Rohingya sejumlah 198 ditolak oleh Angkatan Laut Kerajaan Thai dan perahu itu didorong kembali ke laut. Insiden ini menggemparkan dunia internasional karena muncul klaim bahwa 20 orang mati akibat dehidrasi dan kelaparan. Kemudian Angkatan Laut Thai juga mendorong kembali 8 kapal berisi total 1.200 orang Rohingya ke laut. Namun diakui Lewa bahwa pernyataan itu seakan dibesar-besarkan karena hanya terdapat satu orang saja yang dapat berbahasa Melayu.

Kenyataan lain adalah benar ketika orang Rohingya diatas kapal dipukuli dan dirampas barang-barang pokoknya oleh pemerintah Thai. (Allard 2009)

Untuk mencapai Malaysia dan Indonesia mereka juga menggunakan kapal dengan menumpang kapal ilegal untuk perdagangan manusia, menurut Lewa mereka mengaku masing-masing penumpang menghabiskan US \$ 9-11 kepada perusahaan kapal. Padahal biaya sebenarnya untuk perjalanan laut saja bisa berkisar kurang dari US \$ 300 sampai US \$1.000 untuk sampai ke Malaysia. Namun sesampainya di Malaysia dan Indonesia dengan segera mereka dikepung dan ditangkap oleh aparat setempat karena dianggap sebagai imigran gelap.(Yeni 2007)

Dan pada tahun 2012, ketika kondisi dalam Negara Bagian Rakhine memanas, ledakan eksodus yang lebih baru khususnya pada Mei 2012 ke arah Bangladesh serta negara-negara lain. Bangladesh tidak menyambut dengan baik kloter imigran kala itu, ini diakibatkan oleh kondisi internal dari Bangladesh sendiri yang tidak memungkinkan untuk menanggung konsekuensi dari kerusuhan di Myanmar, dan hubungannya yang memburuk dengan pengungsi Rohingya. Pelayaran kapal-kapal dari orang Rohingya ini melewati Laut Andaman yang bertujuan ke Thailand, Malaysia dan Indonesia. Namun Thailand hanya membiarkan orang Rohingya di kedaulatan mereka selama 2 hari, kembali mendorong kapal-kapal itu kelaut dan hanya memberi beberapa kilo beras dan sedikit air. Akhirnya mereka terapung-apung di Lautan Malaysia dan Indonesia barat.

Malaysia dan Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas muslim melakukan tindakan yang sama kepada orang-orang Rohingya di kedaulatan perairan mereka. Malaysia hanya memperbolehkan mereka berada di daerah Malaysia tapi tidak mendarat di daratan Malaysia. Malaysia juga bersedia memberi bantuan kepada orang Rohingya yang berada di kapal. Indonesia melalui Angkatan Lautnya juga tidak mengizinkan orang Rohingya untuk mendarat di Indonesia, larangan ini juga berlaku bagi nelayan dan masyarakat Indonesia. Tindakan ini dilakukan karena orang Rohingya dianggap sebagai imigran ilegal karena tidak mempunyai kewarganegaraan.